RESTRUKTURISASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH

Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Lia Hikmatul Maula
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: dina.fau@gmail.com, anadarto54@gmail.com,
liahikmatulmaula10@gmail.com

ABSTRACT

The major function of two banking is the fundraising and channeling funds. And those of conventional banks in the distribution of funds is known as the credit while in the syariah banking is financing. In practice in that of conventional banks often found problems that had occurred in do credit, one of them is extreme customers to repay a fund in accordance with the agreement. As also often occurring in that of conventional banks, syariah banking in their function as financial intermediary is face issues such as npf. Inability is typical of the customers to fulfill their obligations, Make the quality of assets soured and decreased their revenue status. This is the kind of research is library research and used qualitative analysis descriptive. This needs to be done by syariah banks to recover from npf and help customers to solve duties it syariah banks can restructure through: rescheduling; reconditioning back; restructuring. However if the restructuring it appeared that did not work, then syariah banks can do the npf through: seizure collateral, the national syariah arbitration, and settlement of passing litigation.

Keywords: Sharia Bank, Non Performing Financing, Restructuring.

ABSTRAK

Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan. Dalam prakteknya di Bank konvensional sering ditemukan permasalahan dalam melakukan kredit, salah satunya tidak mempunya nasabah untuk mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian. Sebagaimana juga yang sering terjadi di Bank konvensional, Perbankan syariah dalam fungsinya sebagai financial intermediary menghadapi permasalahan seperti permasalahan pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, membuat kualitas aset (pembiayaan) bank memburuk dan mengurangi pendapatan bank syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Upaya yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk menyelamatkan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: rescheduling (penjadwalan kembali); reconditioning (persyaratan kembali); restructuring (penataan kembali). Namun apabila upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, dan penyelesaian lewat litigasi.

Kata kunci: Bank Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi

PENDAHULUAN

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam kegiatan usahanya mengikuti dasar dan prinsip-prinsip perbankan yang sudah ada sejak bank

pertama kali didirikan di Indonesia. Sedangkan Bank syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al Qur'an dengan kata lain, bank syariah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2005).

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu produk simpanan (*liability based product*) seperti giro, deposito dan tabungan. produk aset (*asset based product*) seperti pembiayaan. dan produk-produk jasa (*services based product*) seperti pengiriman uang, *save deposit box*, bank garansi, *letter of credit*, dan sebagainya (Wangsawidjaja, 2012).

Adapun pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) antara lain bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan tanpa surat perjanjian tertulis, bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang melebihi batas maksimal pembiayaan (*legal lending limit*), dan menerapkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) sebagai salah satu faktor penilaian pemberian pembiayaan (Institut Bankir Indonesia, 2001).

Pembiayaan pada masing-masing akad di perbankan syariah per Februari 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali Istishna. Pertumbuhan dengan nominal tertinggi adalah akad Murabahah (jual beli) sebesar 13,96 persen atau meningkat Rp 17,03 triliun. Berikutnya adalah akad Musyarakah yang pembiayaannya tumbuh 27,72 persen atau sebesar Rp 16,89 triliun. Peningkatan pembiayaan tersebut juga diikuti dengan peningkatan resiko kredit macet di perbankan syariah.

Pada Februari 2017, secara nominal Murabahah menjadi akad dengan NPF tertinggi yaitu sebesar Rp 6,82 miliar atau setara dengan rasio NPF 4,9 persen.

Sementara itu, rasio NPF gross tertinggi terjadi pada akad Ijarah yang meningkat dari 1,79 persen pada Februari 2016 menjadi 7,4 persen pada Februari 2017 (Kompas.com, 2017). Untuk mengatasi kondisi tersebut bank syariah seharusnya melakukan upaya penyelesaian salah satunya adalah restrukturisasi.

Restrukturisasi atau sering disebut dengan penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar dapat kembali memenuhi kewajibannya (Djamil, 2012). Untuk itu, dalam tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.

KAJIAN LITERATUR

Restrukturisasi atau sering disebut dengan penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006. Tentang laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya” selanjutnya PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31: restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank Syariah (Djamil, 2012).

Restrukturisasi pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*. *Prudential principle* adalah

pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya (Anshori, 2010).

Artinya, bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya memperhatikan prinsip dasar Ekonomi Islam yaitu: *riba*, *gharar* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) (Syaodih, 2009). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Kredit bermasalah timbul bukan secara tiba-tiba tetapi secara perlahan-lahan yang didahului tanda-tanda penyimpangan (*signal of deviation*) tanda-tanda penyimpangan tersebut berasal dari sejumlah variabel, antara lain kondisi keuangan debitur, kondisi bidang usaha, sikap debitur, sikap bankir dan *banking environment*.

Pengelolaan pembiayaan bermasalah juga penting karena reputasi atau nama baik sebuah lembaga keuangan atau bank sering dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang sedang bermasalah hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat ataupun kalangan perbankan sendiri terhadap lembaga keuangan atau bank tersebut sehingga akan mempengaruhi aktivitas usahanya secara keseluruhan. Karena alasan tersebut terjadinya pembiayaan bermasalah dapat menjadikan beban psikologis bagi manajemen (Latumaerissa, 1999).

Pengelolaan pembiayaan bermasalah memerlukan cara-cara dan perhatian yang lebih khusus. Hal itu disebabkan proses pengelolaan pembiayaan bermasalah jauh lebih sulit dibandingkan dengan proses pemberian biaya. Pada prinsipnya pengelolaan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan:

Pengumpulan Informasi; merupakan pekerjaan yang sulit dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah. Pengusaha yang diberi modal seringkali tidak kooperatif dan bahkan enggan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Sehingga diperlukan informasi dari sumber yang lain seperti berkas nasabah. Informasi dasar yang diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah informasi-informasi sebagai berikut: (1) Hubungan bank dengan nasabah, engan mempelajari hubungan lembaga keuangan dengan nasabah selama ini dapat diperoleh gambaran tentang kemungkinan terbentuknya kerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut; (2). Potensi manajemen, gambaran mengenai potensi dan kemampuan manajemen nasabah di masa datang dapat diperoleh dengan melihat perkembangan usahanya serta kebijakan yang dilakukan dalam mengelola usahanya; (3). Laporan keuangan, dengan menganalisis perkembangan keuangan usaha nasabah kemungkinan dapat diketahui penyebab utama terjadinya permasalahan; (4). Kekuatan dan kelemahan lembaga atau bank dari sisi hukum, dengan melakukan tinjauan ulang terhadap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan nasabah, diharapkan dapat mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada yang dapat merugikan bank atau lembaga keuangan secara hukum. Jika kelemahan ditemui maka perlu untuk hati-hati dalam mengadakan hubungan atau untuk melakukan tindakan selanjutnya terhadap nasabah di masa mendatang; (5). Posisi-posisi kreditur lain, posisi-posisi kreditur lain terhadap aset perusahaan nasabah perlu pula dipelajari. Sehingga apabila sewaktu-waktu dilakukan penjualan aset sebagai upaya penyelamatan bermasalah tidak menemui kesulitan. Sumber informasi lain yang dapat digunakan antara lain: (a). Industri atau pesaing-pesaing (*competitors*) nasabah; (b). *Suppliers* yang digunakan; (c). Nasabah lain yang kenal debitur yang bersangkutan; (d). Instansi-instansi dan lembaga-lembaga lain (Latumaerissa, 1999).

Analisis Permasalahan, Dalam praktek perbankan proses perencanaan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sering diistilahkan dengan game plan atau rencana strategis yang dipilih untuk menyelesaikan masalah kreditur dengan debitur atau

nasabah (Latumaerissa, 1999). Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa digunakan kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Upaya yang dilakukan tergantung pada kesulitan yang dihadapi nasabah atau faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Pilihan tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: (1). *Rescheduling*, pemberian modal pada dasarnya dilandasi rasa saling percaya dan kasih sayang, Islam tidak membenarkan tujuan yang baik ini dikotori dengan mengambil keuntungan dibalik kesulitan orang yang berhutang atau yang diberi modal. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu memberi keringanan dalam hal jatuh tempo dengan memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jarak waktu angsuran, dan penurunan jumlah untuk setiap angsuran (Suyatno, 2003); (2). *Restructuring*, Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka dapat diberikan modal tambahan (injeksi). Hal tersebut dapat dilakukan apabila diyakini bahwa usaha nasabah masih dapat dihidupkan kembali. Pertimbangan yang dipakai adalah prospek usaha nasabah dan manajemen masih dapat dipercaya (Sinungan, 1993); (3). Penyelesaian melalui jalur hukum, Penyelesaian melalui saluran hukum dilakukan apabila upaya yang dilakukan sebelumnya seperti pemberian keringanan jatuh tempo maupun jumlah angsuran dan penambahan modal tidak dapat menyelesaikan masalah. Atau bank beranggapan bahwa jalan tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ada dua cara yang lazim digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan atau kredit bermasalah yaitu: melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga; (4). Penghapusan kredit (modal pembiayaan), Penghapusan kredit merupakan langkah terakhir yang ditempuh bank atau lembaga keuangan, bila keadaan pembiayaan bermasalah masih tetap berlarut-larut walaupun telah dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan: dalam PBI (Peraturan

Bank Indonesia) No. 10/18/PBI/2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut, bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui: *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu; *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank; *restructuring* (penataan kembali), perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas bank, konversi akad pembiayaan, konversi perusahaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah, dan konversi perusahaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah (Usman, 2012).

RESTRUKTURISASI PER AKAD

Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah konversi piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1). Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar; (2). Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (3). Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad: 1) Ijarah muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik; 2) Mudharabah dengan merujuk kepada Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000

tentang pembiayaan mudharabah; 3) Musyarakah dengan merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No.8/DSN-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan.

Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara, dilakukan sebagai berikut: 1) Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas; 2) Bank menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah; 3) Bank membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan; 4) Bank melakukan penyertaan modal sementara sebesar sisa kewajiban nasabah.

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan tepat waktu dengan dianalisa perkembangan penyelesaian dan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan apabila ditemukan potensi masalah baru, dengan memberi petunjuk dan arahan pada nasabah untuk segera memperbaiki keadaan keuangannya.

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI JAMINAN

Pada jaminan hak tanggungan, Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, menyatakan apabila debitur cidera janji maka alternatif yang dapat dilakukan oleh bank adalah melelang barang jaminan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 46, Jenis agunan yang dapat diakui sebagai jaminan pembiayaan adalah surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek serta kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

PENYELESAIAN MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

Pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/ 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa:“Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah.” Demikian juga dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan jika penyelesaian sengketa melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan tidak mencapai kesepakatan. Jadi, mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan jika penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui musyawarah dan mediasi tidak mencapai kata sepakat.

PENYELESAIAN MELALUI LITIGASI

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama yang sebelumnya meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, kini diperluas dengan bidang ekonomi syariah. Maka setelah disahkan UU No. 3 Tahun 2006 tersebut menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada pengadilan agama.

HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Hapus buku/*write off* adalah pinjaman atau kredit macet yang tidak dapat ditagih lagi dan dihapusbukkan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Sedangkan hapus tagih adalah Bank meniadakan upaya penagihan atas kewajiban Debitur yang telah di hapus buku.

Ketentuan tentang hapus buku dan atau hapus tagih pada Peraturan bank Indonsia nomor:7/2/pbi/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum Pasal 70 adalah hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet, hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*), hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana. Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan Permasalahan dalam pembiayaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain: faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis serta faktor ketidakmampuan manajemen. Dalam rangka menyelamatkan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: *rescheduling* (penjadwalan kembali); *reconditioning* (persyaratan kembali); *restructuring* (penataan kembali). Namun apabila upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, hapus buku dan hapus tagih, dan penyelesaian lewat litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Institut Bankir Indonesia. (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Latumaerissa, J. R. (1999). *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sinungan, M. (1993). *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suyatno, T. (2003). *Dasar-dasar Perkreditan Edisi IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syaodih, N. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Estu Suryowati, "Ini Alasan Pembiayaan Macet di Perbankan Syariah Cukup Tinggi", <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/28/222515226/ini.alasan.pembiayaa.n.macet.perbankan.syariah.cukup.tinggi>. Diakses pada 10 Juli 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia no.21 tahun 2008, dalam http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf. (10 Juli 2018).